

SKRIPSI

**ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA
DI JAWA BARAT 2017-2021**

EVANTY CAESARISMA



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

**ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA
DI JAWA BARAT 2017-2021**

Sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh:

EVANTY CAESARISMA



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

**ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN/ KOTA
DI JAWA BARAT 2017-2021**

Disusun dan diajukan oleh:

EVANTY CAESARISMA

A011191171

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, Februari 2023

Pembimbing I

Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si, CSF.
NIP. 19590303 198810 1 001

Pembimbing II

Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF.
NIP. 19681221 199512 1 001

Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Hasanuddin



SE., M.Si., CWM.
NIP. 19740715 200212 1 003

SKRIPSI

**ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA
DI JAWA BARAT 2017-2021**

Disusun dan diajukan oleh :



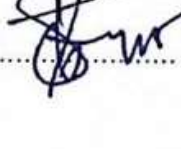

EVANTY CAESARISMA

A011191171

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 21 Maret 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Bakhtiar Mustari., M.Si., CSF.	Ketua	1..... 
2	Dr. Hamrullah., S.E., M.Si., CSF.	Sekretaris	2..... 
3	Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E, M.Si CWM®	Anggota	3..... 
4	Dr. Sabir, SE, M.Si CWM®	Anggota	4..... 



Dr. Sabir, SE, M.Si CWM®
NIP. 19740715 2000212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama Mahasiswa : **EVANTY CAESARISMA**
Nomor Pokok : **A011191171**
Program Studi : **Ekonomi Pembangunan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas
Hasanuddin**
Jenjang : **Sarjana (S1)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ***Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2017-2021*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi

Makassar, April 2023
Yang menyatakan



(Evanty Caesarisma)

A011191171

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini dibuat bukan hanya untuk sebagai pemenuhan persyaratan bagi penulis guna mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, akan tetapi penulis mengharapkan masalah ekonomi yang penulis kaji dapat tergambarkan dalam bentuk skripsi sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah penulis peroleh selama menjadi mahasiswa ekonomi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis dengan terbuka akan menerima kritik maupun masukan dari pembaca terkait tulisan ini agar skripsi ini dapat berguna lebih baik bagi para pembaca.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penyusunan tidak terlepas dari partisipasi beberapa pihak terkait yang telah mendukung penulis secara penuh. Maka dari itu, penulis merasa wajib menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada mereka secara khusus sebagai berikut:

1. Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. atas kehendak dan karunia-Nya yang memberikan penulis kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dan kepada Nabiullah Muhammad SAW.
2. Kedua orang tua saya yang telah mendidik serta ketiga saudara saya Egi, Dani dan Rehan yang telah memotivasi, dan memberikan dukungan lahir dan batin.

Terima kasih telah menjadi keluarga yang berhasil membawa penulis hingga titik ini.

3. Bapak Dr. Sabir, SE, M.Si CWM® selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi. Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Ekonomi.
4. Bapak Dr. Bakhtiar Mustari, M.Si., CSF., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF., selaku pembimbing II, penulis sangat berterimakasih atas segala pemikiran, ide, bantuan, arahan, nasehat, kesabaran, dan waktu yang diluangkan selama proses hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen penguji Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si., CWM®, dan Bapak Dr. Sabir, SE, M.Si CWM®, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas saran dan kritik terhadap hasil penelitian sehingga lebih menyempurnakan tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan pengetahuan dan menginspirasi, terima kasih atas segala pembelajaran dan bantuan selama masa studi penulis.
7. Staf dan karyawan akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terkhusus Pak Aspar, Pak Oscar dan Pak Rahim yang telah banyak membantu dalam segala hal terkait berkas dan dokumen akademik.
8. Untuk Athalia Alamanda Alfatah terimakasih sudah menjadi teman evanty dari semester 1 sampai selesai, terimakasih atas semua bantuannya tal dalam bentuk apapun itu, terimakasih pertemanan yang membawa kearah positif serta negatif ini. Kalau tal bangga berteman sama saya, saya juga bangga punya teman seperti

talia anak bungsu yang super kereenn. Walaupun sebentar lagi berakhir harapan penulis semoga pertemanan kita tidak hanya sampai disini.

9. Untuk Dwi Utami Putri terimakasih sudah jadi temannya evanty walau tidak dari awal semester tapi evanty bersyukur bisa bertemu kembali dengan duwikk. Terimakasih atas bantuannya dalam bentuk apapun itu duwik. Kamu jugaa anak bungsu yang suuper kerenn. Harapan penulis pertemanan kita tidak hanya sampai disini duwik.
10. Untuk Muh. Rifqi Surahman, Gabriel James, Kwan Wirawan Kwandou terimakasih atas bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa, penulis sangat bersyukur bertemu kalian yang super kocak tetapi punya tujuan berkuliah yang jelas.
11. Untuk teman-teman GRIFFINS yang tidak dapat saya sebut satu persatu, terimakasih atas pertemanannya selama menjadi mahasiswa Universitas Hasanuddin, terimakasih atas bantuannya.

Akhir kata, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam melakukan penulisan skripsi ini dan senantiasa mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. dan diberi balasan dengan sebaik – baik balasan dan senantiasa melimpahkan ridho dan berkah-Nya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 3 April 2023

Evanty Caesarisma

ABSTRAK**ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN/ KOTA
DI JAWA BARAT 2017-2021**

**Evanty Caesarisma
Bakhtiar Mustari
Hamrullah**

Ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang ada di setiap negara dan merupakan masalah yang berkelanjutan sehingga menjadi masalah yang harus segera diatasi. Kesenjangan pendapatan antarpenduduk suatu wilayah dapat dilihat dari indeks gini yang tidak merata di Provinsi Jawa Barat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2017-2021. Penelitian ini menggunakan data panel dengan jumlah sampel sebanyak 27 kabupaten/kota dengan jangka waktu 5 tahun. Model analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan teknik estimasi Generalized Least Square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, investasi PMTB dan upah minimum berpengaruh signifikan. Hal ini didukung oleh uji statistik yang menunjukkan seluruh variabel independen pada taraf signifikansi 5% dengan probabilitas 0,00.

Kata Kunci : Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi PMTB, Upah Minimum.

ABSTRACT**ANALYSIS OF REGENCY/CITY INCOME INEQUALITY IN
WEST JAVA IN 2017-2021****Evanty Caesarisma****Bakhtiar Mustari****Hamrullah**

Income inequality is a problem that exists in every country and is an ongoing problem so it becomes a problem that must be addressed immediately. The income gap between residents of a region can be seen from the Gini index which is not evenly distributed in West Java Province which has an impact on people's welfare. Therefore, this study aims to determine the factors that cause income inequality in regencies/cities in West Java Province for the 2017-2021 period. This study uses panel data with a total sample of 27 districts/cities with a period of 5 years. The analysis model used is multiple regression with the Generalized Least Square estimation technique. The results of this study indicate that economic growth, PMTB investment and minimum wages have a significant effect. This is supported by statistical tests which show all independent variables at a significance level of 5% with a probability of 0,00.

Keywords: Income Inequality, Economic Growth, PMTB Investment, Minimum Wage.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Teori.....	9
2.1.1 Teori Kuznet	9
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	14
2.1.3 Investasi	15
2.1.4 Upah Minimum	17
2.2 Hubungan Antar Variabel	19
2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pendapatan.....	19
2.2.2 Hubungan Investasi dengan Ketimpangan Pendapatan	20
2.2.3 Hubungan Upah Minimum dengan Ketimpangan Pendapatan.....	20
2.3 Studi Empiris.....	21
2.4 Kerangka Pikir	22

2.5 Hipotesis Penelitian	24
BAB III. METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	25
3.2 Lokasi Penelitian.....	25
3.3 Jenis dan Sumber Data	25
3.4 Metode Pengumpulan Data	26
3.5 Model Analisis Data	26
3.6 Uji Asumsi Klasik	27
3.7 Pengujian Hipotesis	30
3.7.1 Uji Statistik.....	30
3.8 Defenisi Operasional	32
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	34
4.1.1 Keadaan Geografis Jawa Barat.....	34
4.2 Perkembangan Variabel Penelitian.....	35
4.2.1 Perkembangan Data Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021	36
4.2.2 Perkembangan Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021	38
4.2.3. Perkembangan Data Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021	40
4.2.4 Perkembangan Data Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021	42
4.3 Hasil Estimasi	44
4.3.1 Uji Model Regresi Data Panel	44
4.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	47
4.3.3 Hasil Uji Statistik.....	50
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	54
4.4.1 Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021	54
4.4.2 Analisis Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021.....	55

4.4.3 Analisis Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021	56
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Gini Tertinggi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2021.....	3
Tabel 1.2 Perbandingan Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2017-2021	4
Tabel 2.1 Ukuran Nilai Indeks Gini	13
Tabel 4.1 Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021 (Indeks).....	37
Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021.....	39
Tabel 4.3 Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021.....	41
Tabel 4.4 Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021	43
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow.....	45
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman	46
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas	48
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	49
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi	49
Tabel 4.10 Analisis Regresi Variabel Koefisien	50
Tabel 4.11 Hasil Uji F.....	51
Tabel 4.12 Hasil Uji t	52
Tabel 4.13 Hasil R ²	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	24
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

I. Rekapitulasi Data.....	63
II. Hasil Transformasi Data.....	67
III. Hasil Estimasi	71
IV. Koefisien Kabupaten/Kota	75
V. Biodata	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi selalu menjadi tolak ukur keadaan perekonomian suatu wilayah, struktur ekonomi dan semakin tereduksinya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Setiap wilayah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya dapat diukur dengan pembangunan ekonomi melalui Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan tujuan yang sama yakni menekan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Indeks ketimpangan yang lazim dikenal dengan “Koefisien Gini” mencerminkan ketimpangan pendapatan masyarakat dibandingkan dengan pendapatan masyarakat lainnya yang apabila skalanya mendekati nol mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Perbedaan pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak perbedaan tingkat kesejahteraan daerah, yang pada akhirnya akan menyebabkan ketimpangan pendapatan antar daerah, dengan kata lain ketimpangan pendapatan suatu daerah semakin besar.

Permasalahan terkait ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan yang ada di setiap negara dan merupakan permasalahan yang berkelanjutan sehingga menjadi permasalahan yang harus segera diatasi.

Kesenjangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah dapat dilihat dari indeks gini yang tidak merata di berbagai Provinsi di Indonesia sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Jika pendidikan meningkatkan pendapatan karena pendidikan lebih tinggi di atas distribusi pendapatan, itulah yang menyebabkan ketimpangan pendapatan. Hal tersebut memerlukan upaya khusus dari pemerintah dalam mengambil kebijakan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan berbagai usaha dalam rangka peningkatan distribusi pendapatan dari berbagai aspek.

Perekonomian daerah yang tinggi tidak menjamin adanya pemerataan pendapatan, namun pertumbuhan ekonomi yang pesat tetap dipandang sebagai strategi unggulan pembangunan ekonomi. Padahal, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan percepatan tidak menghilangkan ketimpangan. Perbedaan paling nyata dalam pembangunan adalah pada aspek pendapatan yang melahirkan kelompok kaya dan miskin, pada aspek spasial yang mengarah pada daerah maju dan tertinggal, dan pada aspek sektoral yang menghasilkan sektor unggulan dan non unggulan.

Di Indonesia saat ini telah terjadi ketimpangan pendapatan/ perbedaan distribusi pendapatan antar masyarakat dalam wilayah yang sama dan cukup mencolok.

Untuk melihat seberapa timpang pendapatan yang terjadi berdasarkan Provinsi di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data gini ratio dengan nilai tertinggi pada tahun terakhir yakni 2021.

Tabel 1.1
Indeks Gini Tertinggi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2021

PROVINSI	INDEKS GINI
	TAHUN
	2021
DI YOGYAKARTA	0,436
DKI JAKARTA	0,411
GORONTALO	0,409
JAWA BARAT	0,406
PAPUA	0,396
SULAWESI TENGGARA	0,394
NUSA TENGGARA BARAT	0,384
SULAWESI SELATAN	0,377
BALI	0,375
PAPUA BARAT	0,374

Sumber : Badan Pusat Statistik

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 terdapat 10 Provinsi yang memiliki indeks gini yang paling tinggi berdasarkan data tahun terakhir, Provinsi Jawa Barat salah satunya dengan indeks gini tahun terakhir sebesar 0,406 bahkan lebih besar dibandingkan indeks gini secara nasional (Indonesia) data tahun terakhir yakni sebesar 0,381. Nilai indeks gini memiliki nilai 0 hingga 1, semakin tinggi indeks gini maka dapat dikatakan semakin tinggi ketimpangan yang terjadi di wilayah tersebut.

Gini ratio Provinsi Jawa Barat diberitakan selalu berada diatas gini ratio Indonesia. Berikut merupakan perbandingan nilai gini ratio Provinsi Jawa Barat dengan gini ratio Indonesia selama 5 tahun terakhir.

Ketimpangan pendapatan yang ada di Jawa Barat cukup serius untuk diperhatikan, jika tidak tangani dengan mencari tahu faktor penyebab ketimpangan Jawa Barat, akan berpotensi memiliki dampak.

Tabel 1.2
Perbandingan Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Indonesia
Tahun 2017-2021

	INDEKS GINI				
	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
JAWA BARAT	0,403	0,407	0,402	0,403	0,406
INDONESIA	0,393	0,384	0,380	0,385	0,381

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik selama 5 tahun terakhir, indeks gini Provinsi Jawa Barat tidak pernah berada dibawah indeks gini Indonesia. Indeks gini Provinsi Jawa Barat selalu menyentuh hingga angka 0,400. Sedangkan indeks gini Indonesia tidak pernah menyentuh angka 0,400, indeks tertinggi yang dicapai Indonesia selama 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 sebesar 0,393.

Indeks gini tidak berimbang dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat umumnya berada di atas tingkat nasional. Dapat dikatakan bahwa Provinsi Jawa Barat gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam proses pembangunannya, atau pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tidak menghasilkan pertumbuhan yang inklusif. Sering terjadi *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

Menurut Kanbur (2010), pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang dapat meningkatkan pemerataan dan aksesibilitas untuk semua dan pertumbuhan inklusif mencerminkan pertumbuhan yang dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Sehingga nantinya pertumbuhan inklusif ini mengatasi permasalahan pembangunan melalui prinsip peningkatan

pertumbuhan (*pro-growth*), penciptaan lapangan kerja (*pro-job*) dan penyeimbangan dalam ketimpangan (*pro-poor*).

Kemerataan distribusi pendapatan merupakan salah satu target atau tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan, dimana distribusi pendapatan merupakan pembagian penghasilan atau pemerataan pendapatan di suatu wilayah bertujuan untuk menekan tingkat kesenjangan di dalam masyarakat. Dalam proses produksi, pemilik faktor produksi akan menerima kompensasi atas faktor produksi yang berkontribusi dalam proses produksi. Proses distribusi pendapatan ini akan berlangsung dalam siklus (perputaran) konsumen yang harus membayar harga barang. Tetapi di sisi lain, menjadi pemasok faktor modal, tenaga kerja, sumber daya alam atau faktor jasa sehingga, akan menerima sebagian dari pendapatan pada waktu tertentu dan membayar harganya pada waktu lain.

Teori Kuznets menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki hubungan lurus dengan pertumbuhan ekonomi, pada saat produktivitas tenaga kerja meningkat akan mempengaruhi output, meningkatnya output terindikasi bahwa pekerja wilayah sekitar produktif dan memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Output tersebut akan terhitung dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah dan akan mengurangi tingkat perbedaan pendapatan.

Investasi pula dalam teorinya mengatakan bahwa pembentukan modal merupakan faktor penting yang menentukan pembentukan pertumbuhan

ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat, naik turunnya investasi yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor ketimpangan pendapatan terjadi

Disisi lain dalam teori ekonomi neoklasik berpendapat bahwa upah minimum dapat meningkatkan daripada mengurangi ketimpangan pendapatan. Upah minimum menyebabkan, non-pasar, berperan dalam menentukan ambang batas upah minimum di pasar tenaga kerja, membuat harga tenaga kerja lebih mahal. Jika harga pekerja naik, upah minimum akan menyebabkan penurunan permintaan pekerja dan pekerja akan kehilangan pekerjaan.

Selain dari data serta teori pendukung, peneliti juga memberikan penelitian yang membahas ketimpangan pendapatan. Penelitian tersebut antara lain. Oleh F. Ramadhan (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Berbanding terbalik dengan penelitian RF Yoertiara (2022) yang menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Dalam penelitian N. Hartini (2017) bahwa variabel investasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, berbanding terbalik dengan hasil penelitian S. Holijah (2022) yang menyatakan bahwa investasi tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Menurut SN Sungkar dkk. (2015) menyatakan bahwa upah minimum dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan, sedangkan menurut AN

Tsamara (2021), bahwa upah minimum tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan judul, **“Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021.
2. Apakah investasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021.
3. Apakah upah minimum kabupaten/kota berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021
2. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021
3. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya yang bertemakan ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah minimum kabupaten/kota.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

Tinjauan teori merupakan landasan yang digunakan sebagai pedoman tertulis yang memudahkan peneliti untuk mengarahkan faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian.

2.1.1 Teori Kuznets

Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan kemakmuran kondisi perekonomian di dalam masyarakat suatu wilayah. Ketimpangan pendapatan terjadi karena adanya perbedaan pendapatan. Menurut Sukirno (2006), ketimpangan pendapatan merupakan suatu konsep yang membahas tentang persebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat.

Ketimpangan pendapatan ditentukan oleh tingkat pembangunan suatu negara, heterogenitas etnis, dan adanya kediktatoran dan pemerintahan yang gagal. Ketimpangan pendapatan muncul pada tahap awal pertumbuhan ekonomi. Pada titik ini, distribusi pendapatan akan memburuk, tetapi tahap selanjutnya akan meningkatkan distribusi pendapatan, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil.

Simon Kuznets berpendapat bahwa distribusi pendapatan cenderung menjadi lebih buruk, atau tidak merata pada tahap awal pertumbuhan ekonomi,

tetapi membaik pada tahap selanjutnya. Pembangunan ekonomi pada tahap awal mengalami proses penurunan yang cukup besar dalam distribusi pendapatan, pada saat terjadinya pembangunan yang lebih meningkat garis ketimpangan berbalik menuju tingkat ekuitas yang lebih tinggi dalam pembagian pendapatan. Pada kurva yang ditunjukkan oleh Kuznets, menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan per kapita dengan ketimpangan pendapatan, sebaliknya dalam jangka panjang antara keduanya menjadi korelasi negatif. Kurva Kuznets biasanya dikenal dengan kurva “U-terbalik”.

Menurut Todaro (2003), alasan mengapa pada tahap awal pembangunan distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun kemudian membaik, ini dikaitkan dengan kondisi-kondisi dasar perubahan yang bersifat struktural. Menurut model Lewis, tahapan pertumbuhan awal akan terpusat di sektor industri modern yang memiliki lapangan kerja terbatas namun dengan tingkat upah dan produktivitas terhitung tinggi. Kurva Kuznets dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor ekonomi modern, seiring dengan perkembangan sebuah negara dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern.

Ketimpangan tidak bisa diberantas, hanya bisa direduksi ke tingkat yang dapat diterima oleh nilai tertentu sehingga keseimbangan dalam struktur pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Oleh karena itu, tidak heran jika ketimpangan akan selalu ada, baik itu di negara miskin, negara berkembang,

bahkan negara maju. Hanya saja perbedaannya adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi di masing-masing negara tersebut. Jika ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh semua lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan telah terjadi ketimpangan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan suatu wilayah Adelman dan Morris (1973).

- a) Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan menurunnya pendapatan perkapita.
- b) Inflasi, dimana masyarakat memegang uang tetapi tidak diikuti dengan penambahan produksi barang.
- c) Ketidakmerataan pembangunan wilayah.
- d) Banyaknya investasi dalam proyek yang padat modal (*Capital Intensive*), sehingga tingkat pendapatan modal dari kerja tambahan lebih besar dibandingkan tingkat pendapatan orang yang bekerja, yang dapat memicu meningkatnya pengangguran.
- e) Kurangnya mobilitas sosial.
- f) Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
- g) Menurunnya nilai tukar (*Term of Trade*) bagi negara berkembang dalam melakukan perdagangan dengan negara maju, akibat

ketidakelastisan permintaan di negara maju terhadap barang ekspor negara berkembang.

h) Menurunnya produktifitas industri kreatif.

Beberapa metode yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan, yaitu:

a) Menurut Bank Dunia

Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok dengan pendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk secara menyeluruh.

1. Tingkat ketimpangan berat, apabila 40% penduduk paling miskin menerima $< 12\%$ dari pendapatan nasional.
2. Tingkat ketimpangan sedang, apabila 40% penduduk paling miskin menerima $12-17\%$ dari pendapatan nasional.
3. Tingkat ketimpangan ringan, apabila 40% penduduk paling miskin menerima $> 17\%$ dari pendapatan nasional.

b) Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menunjukkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di seluruh populasi. Kurvanya berbentuk persegi panjang,

dengan sisi vertikal mewakili persentase kumulatif pendapatan nasional dan sisi horizontal mewakili persentase kumulatif populasi. Kurva ditempatkan secara diagonal di bujur sangkar tersebut. Semakin dekat kurva Lorenz ke diagonal (linier), semakin seragam distribusi pendapatan nasional, sebaliknya, semakin jauh Kurva Lorenz dari diagonal (melengkung) maka semakin menunjukkan ketimpangan pendapatan yang tinggi dan distribusi pendapatan nasional semakin timpang.

c) Indeks Gini

Koefisien Gini atau Gini Index digunakan untuk mengetahui hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan.

Koefisien Gini dihitung dengan akumulasi luas antara diagonal dan Kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total setengah persegi di mana kurva Lorenz berada.

Tabel 2.1
Ukuran Nilai Indeks Gini

Nilai Koefisien	Distribusi pendapatan
< 0,4	Tingkat Ketimpangan Rendah
0,4 – 0,5	Tingkat Ketimpangan Sedang
> 0,5	Tingkat Ketimpangan Tinggi

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), nilai rasio gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Nilai rasio gini yang mendekati 1

menunjukkan ketimpangan yang semakin besar. Rasio gini dengan nilai 0, menunjukkan bahwa pendapatan terdistribusi sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan suatu wilayah. Singkatnya, pertumbuhan ekonomi dapat diperiksa dengan mencapai total Produk Domestik Bruto atau PDB suatu wilayah dengan komponen pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sukirno (2006), alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Perekonomian wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ketahun dikarenakan adanya penambahan pada faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai pula dengan pendapat dari Simon Kuznets.

Teori Kuznets, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin pada awalnya mengarah pada kemiskinan yang tinggi dikarenakan distribusi pendapatan yang tidak merata. Namun, jika negara miskin terus berkembang, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan dan meratanya distribusi pendapatan. Ekonom klasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi selalu cenderung berkurang, meskipun masih dalam tahap awal pertumbuhan. Berdasarkan pengamatannya, beberapa negara

seperti Taiwan, Hongkong, Singapura dan China. Kuznets optimis bahwa pertumbuhan ekonomi justru mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

2.1.3 Investasi

Menurut Mankiw (2000), investasi adalah instrumen yang diperoleh seseorang atau perusahaan untuk menambah modalnya.

Investasi atau penanaman modal adalah pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi di negara berpenghasilan rendah menjadi salah satu penyebab ketimpangan pendapatan. Pasalnya, hanya kawasan yang menarik perhatian investor baik dalam maupun luar negeri yang dianggap menguntungkan.

Ada tiga jenis pengeluaran investasi, yakni sebagai berikut:

1. Investasi tetap bisnis (*business fixed investment*) merupakan peralatan dan perlengkapan yang dibeli oleh perusahaan untuk proses produksi.
2. Investasi residensial (*residential investment*) merupakan pembelian tempat tinggal baru dan property sewa pemilik-penghuni.

3. Investasi persediaan (*inventory investment*) merupakan barang-barang seperti bahan inventaris, barang dalam proses dan barang jadi yang dimiliki perusahaan di gudang.

Dalam pembangunan ekonomi sendiri ada juga yang disebut investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Kontribusi PMTB terhadap laju pertumbuhan menunjukkan dengan peningkatan alokasi pendapatan masyarakat yang diinvestasikan dalam bentuk fisik berupa bangunan, mesin dan lainnya. PMTB juga merupakan komponen terpenting dalam pembentukan PDB/PDRB terbesar setelah konsumsi rumah tangga.

Dalam teori investasi Harrod-Domar (Arsyad, 1999), pembentukan modal/investasi merupakan determinan penting dari pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Harrod-Domar, diperlukan investasi baru sebagai tambahan modal untuk mempercepat perekonomian. Berdasarkan teori Harrod-Domar yang menjelaskan terdapat hubungan antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi di suatu daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita rendah karena tidak ada aktivitas ekonomi yang produktif dan terjadi konsentrasi investasi pada satu wilayah saja.

Investasi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan apabila persebaran investasi merata sehingga meningkatkan produktivitas dan pengoptimalan sumber daya alam serta faktor produksi.

2.1.4 Upah Minimum

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang digabung upah pokok dan tunjangan tetap dari karyawan yang lebih rendah dan kurang dari satu tahun pengalaman kerja di wilayah tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja: PER/MEN/No.18 tahun 2022, tentang upah minimum, bahwa kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/ buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam menjaga daya beli masyarakat.

Upah Minimum Regional (UMR) dibedakan menjadi dua, yaitu Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk. I) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II). istilah upah minimum regional Tingkat I (UMR Tk. I) diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional I Tingkat I (UMR Tk.II) juga mengalami perubahan menjadi Upah Minimum kabupaten/kota (UM kab./ kota)

Upah minimum merupakan kebijakan yang berguna untuk memastikan pekerja mendapatkan upah yang adil bersamaan untuk mencegah kemiskinan di antara para pekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Waldman & Whalen (2007), upah minimum merupakan hal utama dalam penetapan upah secara nasional, tidak hanya itu tetapi upah dapat pula mempengaruhi pendapatan. Mereka yang bekerja di sektor formal menjadi sasaran kebijakan pengupahan minimum. Mereka tidak menerima upah

kurang dari gaji upah minimum yang sah. Maka dari itu, upah minimum muncul untuk melindungi pekerja bagian bawah hingga sering menjadi isu kelas menengah.

Menurut Fachrurrozi (2014), upah dapat diartikan sebagai penghasilan yang diterima pekerja sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan. Upah muncul berdasarkan kontrak kerja yang disepakati, terlepas dari pekerjaannya dan demonisasinya. Pemberian upah baik dalam bentuk uang tunai maupun uang digital.

Teori ekonomi neoklasik berpendapat bahwa upah minimum dapat meningkatkan daripada mengurangi ketimpangan pendapatan. Upah minimum menyebabkan pemerintah berperan dalam menentukan standar upah minimum di pasar tenaga kerja, jika digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan menyebabkan meningkatnya biaya produksi perusahaan yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi. Konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan barang, yaitu mengurangi konsumsi terhadap barang bahkan tidak lagi ingin membeli barang tersebut. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksi hingga ada kemungkinan perusahaan akan memutuskan kerja sama dengan tenaga kerja yang akan menyebabkan penurunan permintaan pekerja dan pekerja akan kehilangan pekerjaan.

2.2 Hubungan Antar Variabel

Hubungan antar variabel dimana variabel bebas (Independen/ berpengaruh) dengan variabel terikat (Dependen/ terpengaruh) dengan simbol X dan Y biasanya dikaitkan dengan analisis hubungan kausal (hubungan sebab akibat).

2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi pengukuran pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu daerah atau wilayah selama periode waktu tertentu. Perbedaan laju pertumbuhan wilayah diindikasikan bahwa pendapatan perkapita rendah yang akan menyebabkan perbedaan pendapatan masyarakat di regional yang sama.

Menurut Todaro (2008), teori Kuznets dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan, artinya pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi negatif, artinya peningkatan pendapatan akan diikuti dengan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan.

2.2.2 Hubungan Investasi dengan Ketimpangan Pendapatan

Investasi atau penanaman modal adalah pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi di negara berpenghasilan rendah menjadi salah satu penyebab ketimpangan pendapatan. Pasalnya, hanya kawasan yang menarik perhatian investor baik dalam maupun luar negeri yang dianggap menguntungkan.

Berdasarkan teori Harrod-Domar yang menjelaskan terdapat hubungan antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi di suatu daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita rendah karena tidak ada aktivitas ekonomi yang produktif dan terjadi konsentrasi investasi pada satu wilayah saja.

2.2.3 Hubungan Upah Minimum dengan Ketimpangan Pendapatan

Upah minimum merupakan kebijakan yang berguna untuk memastikan pekerja mendapatkan upah yang adil bersamaan untuk mencegah kemiskinan di antara para pekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Secara teori ekonomi neoklasik berpendapat bahwa upah minimum dapat meningkatkan daripada mengurangi ketimpangan pendapatan. Upah minimum menyebabkan pemerintah, berperan dalam menentukan ambang batas upah minimum di pasar tenaga kerja, jika upah minimum meningkat akan

meningkatkan biaya produksi perusahaan, meningkatkan harga barang produksi dan akan menurunkan daya beli terhadap barang tersebut. Akibatnya produsen akan menurunkan jumlah produksi hingga memutus kerja sama dengan tenaga kerja sehingga menyebabkan timbulnya perbedaan pendapatan dalam suatu wilayah yang sama.

2.3 Studi Empiris

Nangarumba (2015) dalam penelitiannya dengan hasil yang dicapai dalam penelitian ini salah satunya adalah ditemukan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan pengaruh negatif, kecuali variabel PDRB Sektor Industri. Sedangkan elastisitas, masing-masing variabel independen bersifat inelastis terhadap ketimpangan pendapatan.

Arif dan Wicaksani (2017) dalam penelitiannya dengan menggunakan empat variabel independen yaitu IPM, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan jumlah penduduk. Menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2015 adalah variabel IPM dengan arah koefisien positif.

Ningtyas (2018) dalam penelitiannya dengan hasil analisis menunjukan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Investasi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan

Nadhifah dan Wibowo (2021) dalam penelitiannya dengan hasil analisis diketahui bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan variabel jumlah pekerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, selain itu tingkat pengangguran tersembunyi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian ini berimplikasi pada teori ketimpangan pendapatan dan kebijakan yang diambil untuk mengatasi ketimpangan dengan memperhatikan jumlah tenaga kerja dan tingkat pengangguran tersembunyi di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2013-2019.

Riandi dan Varlitya (2020) dalam penelitiannya dengan hasil menunjukkan bahwa, upah minimum mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan sedangkan kemiskinan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

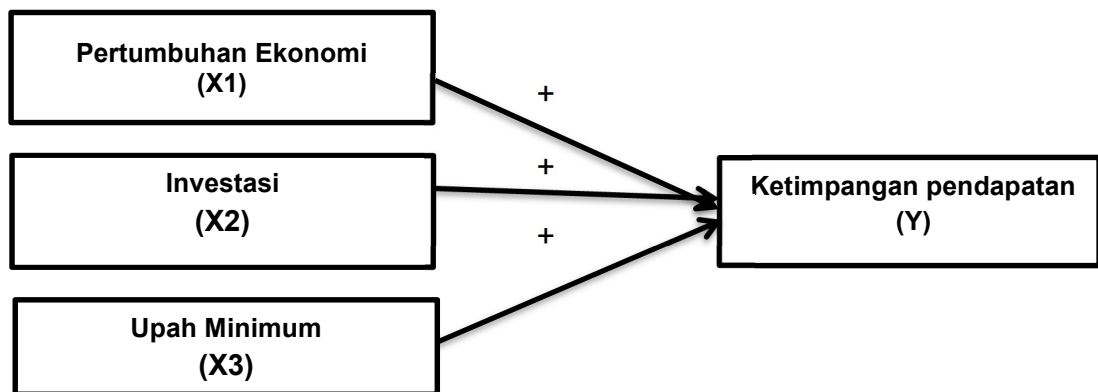
2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan pemaknaan dari konsep yang digunakan sehingga memudahkan peneliti mengoperasikan konsep.

Masalah ketimpangan pendapatan yang ditimbulkan dari faktor ekonomi merupakan masalah yang kompleks terjadi hampir di seluruh wilayah. Dalam

penelitian analisis ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah (1) pertumbuhan ekonomi, (2) investasi, (3) upah minimum. Variabel-variabel tersebut dimaksud akan lebih mengarahkan peneliti untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dari pemaparan tersebut maka dapat dibuat kerangka pikir penelitian sebagaimana pada gambar berikut.

Variabel pertumbuhan ekonomi (X1), variabel investasi (X2) dan variabel upah minimum kabupaten/kota (X3) diindikasikan dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan (Y) berdasarkan teori dan studi empiris yang telah dipaparkan.



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian pada **Gambar 2.1** maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh signifikan ketimpangan pendapatan.
2. Diduga investasi dapat berpengaruh signifikan ketimpangan pendapatan.
3. Diduga upah minimum kabupaten/kota dapat berpengaruh signifikan ketimpangan pendapatan.